



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN**



TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKIP) Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemereintah (LKIP) Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 merupakan capaian akuntabilitas kinerja dalam masa RENSTRA Tahun 2024-2026. LKIP Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2024-2026).

LKIP Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Penyusunan LKIP Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. Komitmen dalam penyusunan LKIP Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKIP Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 terdiri atas: Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja terdiri dari Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran, dan Penutup. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar belakang, maksud, isu strategis, dan struktur organisasi serta keragaman sumberdaya manusia di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan Perjanjian Kinerja . Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama dan Realisasi anggaran pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2024.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2024 telah banyak membuahkan hasil yang positif. 8 indikator sasaran telah memenuhi target yang ditetapkan. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang.

Berkenaan dengan itu, LKIP Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Makassar, Maret 2025

Kepala Dinas Sosial
Provinsi Sulawesi Selatan



Dr. ABD. MALIK FAISAL, S.H.,M.Adm.Pemb
Pembina Utama Madya / IVd
NIP. 19670403 199703 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I - PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Gambaran Umum Organisasi	2
D. Isu Strategis.....	3
E. Struktur Organisasi.....	4
F. Komposisi SDM Organisasi	7
G. Inovasi dalam Reformasi Sistem AKIP dan Pengelolaan Kinerja	9
BAB II – PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	10
A. Rencana Strategis	10
B. Perjanjian kinerja tahun 2024	12
C. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	13

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
A. Capaian IKU	15
B. Capaian Kinerja Sasaran.....	16
Sasaran Strategis 1	16
Sasaran Strategis 2	19
Sasaran Strategis 3.....	23
C. Perbandingan Realisasi Kinerja Selama 5 Tahun Terakhir	27
D. Realisasi Anggaran	29
 BAB IV – PENUTUP	 31

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	7
Tabel 1.2	7
Tabel 2.1	10
Tabel 2.2	12
Tabel 2.3	13
Tabel 3.1	14

Tabel 3.2	15
Tabel 3.3	16
Tabel 3.4	17
Tabel 3.5	17
Tabel 3.6	18
Tabel 3.7	19
Tabel 3.8	20
Tabel 3.9	20
Tabel 3.10	22
Tabel 3.11	24
Tabel 3.12	25
Tabel 3.13	25
Tabel 3.14	26
Tabel 3.15	27
Tabel 3.16	29
Tabel 3.17	29
Tabel 4.1	31

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini merupakan upaya yang selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan dokumen LKIP dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Permenpan RB No. 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan RB No. 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.

Proses penyusunan LKIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. LKIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan

bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

LKIP Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LKIP menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas menurunkan angka populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pada 24 Kabupaten/Kota dan melayani PPKS yang berada di dalam panti. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Kebijaksanaan Teknis di bidang Sosial, meliputi Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial serta Bidang Penanganan Fakir Miskin
- b. Penyelenggaraan urusan sosial dan pelayanan umum di bidang sosial meliputi Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial serta Bidang Penanganan Fakir Miskin.
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang sosial meliputi Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial serta Bidang Penanganan Fakir Miskin
- d. Penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu instansi yang bertugas melaksanakan fungsi urusan wajib artinya ke depan tantangannya begitu berat dan permasalahan semakin kompleks sehingga keberadaan Dinas Sosial Sulawesi Selatan dapat menjawab tantangan dan memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di daerah sehingga dapat mendorong percepatan pembangunan daerah, daya saing dan memajukan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2024 diarahkan untuk pencapaian target sasaran Pembangunan yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 pada Tabel V-2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024-2026, pada Tujuan ke 1 yaitu Mengoptimalkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel, serta Tujuan ke 3 yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat secara merata.

Pada tahun 2024-2026 posisi Gubernur akan diduduki oleh pejabat Gubernur. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan perlu menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) periode 2024-2026 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Pelaksanaan RPD periode 2025-2030 ini diselenggarakan sesuai dengan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai pasal 2 yaitu (ayat 1) berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional, (ayat 2) Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan serta (ayat 3) system perencanaan pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan Negara. Dalam pembagian urusan Undang-Undang RI 32 Tahun 2004 telah digantikan dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Sistem Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan konkuren terbagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Adapun urusan wajib meliputi urusan terkait pelayanan dasar dan urusan yang tidak terkait pelayanan dasar. Dalam kaitan ini Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan menerima tugas untuk membantu Gubernur dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerja dan akuntabilitasnya maka suatu organisasi/ instansi wajib membuat suatu laporan kinerja instansi pemerintah untuk menggambarkan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/kegiatan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui aturan tersebut telah diperkenalkan suatu sistem manajemen pemerintah yang tidak hanya berfokus pada peningkatan akuntabilitas tapi juga pada peningkatan kinerja.

D. ISU STRATEGIS

Prioritas penanganan yang perlu dijadikan agenda utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, maka isu strategis yang perlu ditindaklanjuti adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi Fungsi dan Peran Dinas, beberapa isu strategis yang menjadi perhatian utama diantaranya adalah :

- Perlunya peningkatan kemampuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan yang berkelanjutan dan berbasis kinerja;
- Perlunya peningkatan dukungan, keahlian, disiplin dan etos kerja aparat;
- Perlunya peningkatan dukungan prasarana dan sarana kerja yang memadai;
- Perlunya peningkatan dukungan data dan informasi secara lengkap, benar dan mutakhir.

Untuk itu, optimalisasi fungsi dan peran dinas dilakukan melalui upaya pengembangan kemampuan institusi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan yang berkelanjutan dan berbasis kinerja; peningkatan keahlian, disiplin dan etos kerja aparat; peningkatan dukungan prasarana dan sarana kerja yang memadai dan berkualitas;

serta peningkatan dukungan data dan informasi secara lengkap, benar dan mutakhir.

2. Peningkatan Kualitas Manajemen Pelayanan Sosial, beberapa isu strategis yang menjadi perhatian utama diantaranya adalah :

- Tingginya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Untuk itu, peningkatan kualitas manajemen pelayanan sosial diupayakan melalui pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat; penguatan kelembagaan lokal dan aktualisasi potensi sumber kesejahteraan sosial di daerah; pengembangan perangkat dan jaminan kepastian hukum atau legalisasi; serta pengembangan standarisasi pelayanan. Prinsip dasar dalam upaya ini adalah pengintegrasian pembangunan kesejahteraan sosial dengan pembangunan sektor lainnya, khususnya ekonomi dan politik yang selama ini kurang mempertimbangkan aspek kesejahteraan sosial, bahkan justru sering menjadi sumber permasalahan sosial. Disamping itu, prinsip pendekatan pengembangan modal sosial (*social capital*) yang dimiliki masyarakat harus diupayakan, mengingat sangat terbatasnya kemampuan pemerintah untuk menangani permasalahan sosial yang berkembang semakin kompleks.

3. Kemitraan Sinergis Pengembangan Pelayanan Sosial, beberapa isu strategis yang menjadi perhatian utama diantaranya adalah :

- Belum optimalnya pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Untuk itu, kemitraan sinergis pengembangan pelayanan sosial diupayakan melalui pengembangan jejaring kerjasama, kepedulian, kesetaraan dan kebersamaan dalam peningkatan pelayanan sosial antara Pemerintah dengan masyarakat dan antara masyarakat dengan masyarakat dan dunia usaha; pengembangan partisipasi sosial dalam perumusan dan pengambilan keputusan untuk peningkatan pembangunan sosial; serta pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam upaya perbaikan dan penanggulangan masalah sosial.

Isu Strategis yang dihadapi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan yang dituangkan dalam RENSTRA tahun 2018-2023 adalah permasalahan sosial di Sulawesi Selatan yang cenderung meningkat dilihat dari jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dan kompleksitasnya searah dengan pertumbuhan penduduk karena masih kurangnya lapangan kerja serta kurangnya kesempatan yang diberikan terutama kepada kaum disabilitas dan akses yang diberikan kepada penduduk miskin, yang mengakibatkan

dampak kehidupan berada pada garis kemiskinan, sehingga diperlukannya penanganan yang sangat kompleks bagi semua stakeholder agar permasalahan kesejahteraan sosial dapat ditangani, karena mengingat kondisi masyarakat Sulawesi Selatan yang masih rentan dengan masalah sosial, yang mencakup kemiskinan, Lanjut Usia Terlantar, penyandang Disabilitas dan perilaku menyimpang, kekerasan dan lain – lain.

Kelompok masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti : Lanjut usia terlantar, penyandang cacat atau disabilitas, fakir miskin, anak terlantar dan balita terlantar, anak nakal, anak berhadapan hukum, bencana alam / sosial dan tuna sosial merupakan bagian dari masyarakat yang tidak terpisahkan. Kelompok masyarakat ini perlu mendapat perhatian khusus karena mereka memiliki berbagai keterbatasan sehingga sering kali mereka tertinggal dan terabaikan dalam proses pembangunan yang berakibat kurang dapat menikmati hasil pembangunan dan menjadikan mereka tetap menjadi orang miskin. Belum lagi adanya pertumbuhan ekonomi yang masih terpusat di perkotaan menjadi salah satu akar permasalahan bagi masyarakat miskin khususnya.

Penduduk yang tertinggal dalam proses pembangunan disebut dengan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yaitu seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat, yang oleh karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan karena itu tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterpencilan, dan korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi serta diskriminasi.

Penduduk yang termasuk dalam kelompok Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) cenderung mengalami peningkatan baik kualitas maupun intensitas. Dampak yang ditimbulkan sangat kompleks dan memerlukan penanganan secara khusus. Untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan tersebut, diperlukan data / informasi mengenai berbagai hal yang berkaitan secara akurat, terpercaya dan tepat waktu. Berdasarkan hal di atas, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu stakeholder yang menangani permasalahan sosial, Penanggulangan Kemiskinan dan

menindaklanjuti masalah–masalah sosial lainnya yang ada dengan menetapkan strategi, kebijakan, program dan kegiatan untuk menangani masalah kesejahteraan sosial.

Sehubungan dengan hal tersebut, khususnya dalam kerangka penyelenggaraan akuntabilitas publik, Laporan Kinerja Pemerintah menjadi sangat penting terutama sebagai jawaban atas perjanjian kinerja instansi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, uraian berikut ini secara berturut-turut menjelaskan beberapa aspek yang berkaitan dengan perencanaan strategis dalam manajemen perencanaan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. Di dalamnya mencakup langkah-langkah mencapai tujuan dan sasaran, serta perumusan strategis yang mencakup perumusan kebijaksanaan, program dan kegiatan.

E. STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN

Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas Sosial merupakan unit kerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan Desentralisasi dan Dekonsentrasi dibidang sosial, maka mempunyai tugas pokok dan fungsi struktur kelembagaan sebagai berikut:

- 1. Kepala Dinas**
- 2. Sekretaris**
Sekretaris membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum;**
 - 2) Sub Bagian Program;**
 - 3) Sub Bagian Keuangan.**
- 3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial**
- 4. Bidang Rehabilitasi Sosial**
- 5. Bidang Pemberdayaan Sosial**
- 6. Bidang Penanganan Fakir Miskin**
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional**
- 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :**
 - a. PPRSA Inang matutu Makassar**

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPRSA Inang Matutu pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan yang melaksanakan Pelayanan Kesejahteraan Sosial kepada anak balita terlantar, dengan struktur organisasi sebagai berikut :

- 1) Kepala UPTD;
- 2) Kasubag. Tata Usaha;
- 3) Kepala Seksi Pelayanan
- 4) Kepala Seksi Keterampilan

b. PPSKW Mattiro Deceng Makassar

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPSKW Mattiro Deceng pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan yang melaksanakan Pemulihan wanita tuna susila, dengan struktur sebagai berikut :

- 1) Kepala UPTD;
- 2) Kasubag. Tata Usaha;
- 3) Kepala Seksi Pelayanan
- 4) Kepala Seksi Keterampilan

c. PPSBR Makkareso Maros

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPSBR Makkareso Maros pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan yang melaksanakan Pelayanan Kesejahteraan Sosial kepada Remaja terlantar dan Remaja jalanan, dengan struktur organisasi sebagai berikut :

- 1) Kepala UPTD;
- 2) Kasubag. Tata Usaha;
- 3) Kepala Seksi Pelayanan
- 4) Kepala Seksi Keterampilan

d. PPSLU Mappakasunggu Pare-pare

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPSLU Mappakasunggu Pare-Pare pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan yang melaksanakan Pelayanan Kesejahteraan Sosial kepada Lanjut Usia Terlantar, dengan struktur organisasi sebagai berikut :

- 1) Kepala UPTD;
- 2) Kasubag. Tata Usaha;
- 3) Kepala Seksi Pelayanan
- 4) Kepala Seksi Keterampilan

e. PPRSA Seroja Bone

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPRSA Seroja Bone pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan yang melaksanakan Pelayanan Kesejahteraan Sosial kepada anak Yatim Piatu Yang Kurang Mampu, dengan struktur organisasi sebagai berikut :

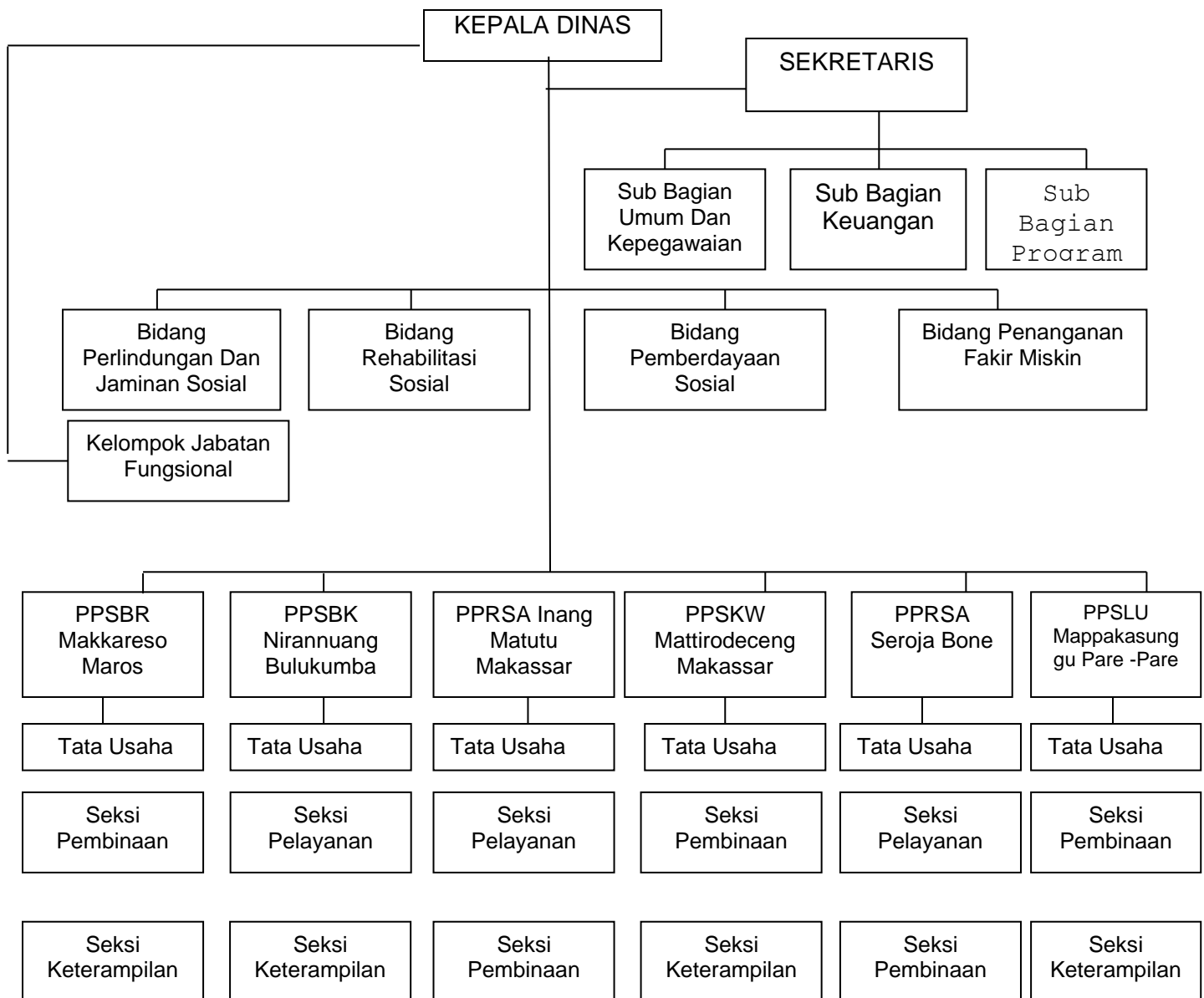
- 1) Kepala UPTD;
- 2) Kasubag. Tata Usaha;
- 3) Kepala Seksi Pelayanan
- 4) Kepala Seksi Keterampilan

f. PSBK Nirannuang Bulukumba

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPSBK Nirannuang Bulukumba pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan yang melaksanakan Pelayanan Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar, dengan struktur organisasi sebagai berikut :

- 1) Kepala UPTD;
- 2) Kasubag. Tata Usaha;
- 3) Kepala Seksi Pelayanan
- 4) Kepala Seksi Keterampilan

**Bagan 1.1
Struktur Organisasi
Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan**



F. KOMPOSISI SDM ORGANISASI

Tersedianya sumberdaya manusia khususnya pekerja sosial dan penyuluh sosial yang cukup dan berkualitas merupakan modal utama keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dan secara langsung akan mempengaruhi kinerja organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Sebagai salah satu perangkat kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Sosial didukung oleh sejumlah personil atau pegawai yang mengemban tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Sampai dengan bulan Januari 2025 Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan memiliki pegawai sebanyak 395 orang yang terdiri dari 290 ASN serta 105 orang tenaga Non ASN, dengan rincian sebagai berikut

1. Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan

Berikut merupakan komposisi PNS di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan jenjang pendidikan :

Tabel 1.1

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	S.3 (Doktoral)	1	0	1 orang
2	S.2 (Pasca Sarjana)	27	25	52 Orang
3	S.1 (Sarjana)	79	84	163 Orang
4	D1-D3 (Sarjana Muda)	2	5	7 Orang
5	SLTA/Sederajat	42	22	64 Orang
6	SLTP/Sederajat	2	1	3 Orang
	Jumlah	153	137	290

2. Komposisi Jenis Kelamin Pangkat/ Golongan

Berdasarkan Jabatan Struktural, pejabat fungsional dan staf pelaksana, berikut merupakan uraiannya berdasarkan pangkat/ golongan :

Tabel 1.2

No	Pangkat	Golongan Ruang	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pembina Utama Madya	IV/d	1	-	1
2.	Pembina Utama Muda	IV/c	1	-	1
3.	Pembina Tingkat I	IV/b	5	10	15
4.	Pembina	IV/a	13	12	25
5.	Penata Tingkat I	III/d	8	4	12
6.	Penata	III/c	21	19	40
7.	Penata Muda Tingkat I	III/b	26	31	57
8.	Penata Muda	III/a	42	37	79
9.	Pengatur Tingkat I	II/d	8	3	11
10.	Pengatur	II/c	12	5	17
11.	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	7	4	11
12.	Pengatur Muda	II/a	3		3
13.	Juru Tingkat I	I/d	1		1
Jumlah			156	134	290

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

a. RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024–2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024–2026. Adapun Tujuan RPD yang terkait dengan urusan Sosial yaitu Mengoptimalkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (TUJUAN I) dan Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata (TUJUAN III), lalu **Tujuan Rencana Strategis** Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan yaitu :

1. Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah.
2. Meningkatkan taraf pelayanan serta pemenuhan kebutuhan hidup bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Adapun Tujuan RPD yang terkait dengan urusan Sosial yaitu Mengoptimalkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (TUJUAN I) dengan Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah (SASARAN 1) serta Optimalnya Kualitas pelayanan publik (SASARAN 2) dan Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata (TUJUAN III) dengan sasaran Menurunkan Angka Kemiskinan (SASARAN 6), lalu **Sasaran Rencana Strategis** Dinas Sosial ada 3 (Tiga) yaitu :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah
2. Meningkatnya Pelayanan serta Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
3. Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Melalui Kelembagaan dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Sasaran, Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan, dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	1. Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	Nilai	100%	90
		2. Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah	Nilai	100%	97,6
		3. Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti	Persen	0%	100%
		4. Nilai saki OPD	Nilai	80.45	80
		5. Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	-	86
Meningkatkan taraf pelayanan dan pemenuhan kebutuhan hidup bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Pelayanan dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan sosial (PPKS)	1. Persentase Peningkatan Pendapatan dalam Pemenuhan Kebutuhan Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persen	51,47%	55%

		2. Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berfungsi sosial setelah mendapatkan Pemenuhan kebutuhan dasar	Orang	100%	10873
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui Kelembagaan	1. Cakupan Peningkatan Kemampuan SDM Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Orang	1077	500

1. Sasaran 1 Rencana Strategis Dinas Sosial “Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah” dengan Indikator Kinerja:

- a. Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah
- b. Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah
- c. Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti
- d. Nilai sakis OPD
- e. Indeks Kepuasan Masyarakat

2. Sasaran 2 Rencana Strategis Dinas Sosial "Meningkatnya Pelayanan serta Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)" dengan Indikator Kinerja:

- a. Persentase Peningkatan Pendapatan dalam Pemenuhan Kebutuhan Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
- b. Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berfungsi sosial setelah mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

3. Sasaran 3 Rencana Strategis Dinas Sosial "Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Melalui Kelembagaan dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial” dengan Indikator Kinerja:

- a. Cakupan Peningkatan Kemampuan SDM Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja 2024 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA PD, RENCANA KERJA (RENJA) 2024, IKU dan APBD. Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2024
1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	1. Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	Nilai	90
	2. Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah	Nilai	97.2
	3. Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti	Persen	100
	4. Nilai saki OPD	Nilai	78
	5. Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82
2. Peningkatan Pelayanan dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1. Persentase Peningkatan Pendapatan dalam Pemenuhan Kebutuhan Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persen	50
	2. Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berfungsi sosial setelah mendapatkan Pemenuhan kebutuhan dasar	Orang	707
3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Melalui Kelembagaan	Cakupan Peningkatan Kemampuan SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	Orang	1086

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan IKU sebagai berikut :

Tabel 2.3
IKU Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
Peningkatan Pelayanan dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Peningkatan Pendapatan dalam Pemenuhan Kebutuhan Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang meningkat pendapatannya untuk pemenuhan kebutuhan dasar berdasarkan hasil evaluasi sebelum dan sesudah diberikan bantuan	Bidang penanganan fakir miskin, Bidang rehabilitasi sosial
	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan bantuan		Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan bantuan	
	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berfungsi sosial setelah mendapatkan Pemenuhan kebutuhan dasar	Orang	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Pelayanan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Bidang perlindungan dan jaminan sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial dan UPT dinas sosial provinsi sulawesi selatan
SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Melalui Kelembagaan	Cakupan Peningkatan Kemampuan SDM Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Orang	Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Nilai evaluasi Post test Minimal 70 dalam Bimbingan Teknis Kesejahteraan Sosial	Bidang pemberdayaan sosial, bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi sosial

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas sebagai salah satu pilar dalam prinsip *good governance* merupakan alat yang digunakan untuk menggambarkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang dapat langsung dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Kaitannya dengan pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah bahwa pembangunan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang pada pelaksanaannya menjadi tanggung jawab OPD, diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik, bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil hingga akhirnya dapat memberikan dampak. Sehingga pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Dalam hal ini, laporan kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sebagaimana diatur dalam Permenpan No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1.	91 <	Sangat Tinggi	ST
2.	76 < 90	Tinggi	T
3.	66 < 75	Sedang	S
4.	51 < 65	Rendah	R
5.	< 50	Sangat Rendah	SR

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Pengukuran capaian keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi dapat dilihat pada tabel capaian indikator kinerja utama di bawah ini :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	FORMULASI PERHITUNGAN	CAPAIAN
Peningkatan dan Pelayan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1. Persentase Peningkatan Pendapatan dalam Pemenuhan Kebutuhan Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persen	50	40,40	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang meningkat pendapatannya untuk pemenuhan kebutuhan dasar berdasarkan hasil evaluasi sebelum dan sesudah diberikan bantuan x 100%	80,8%

	2. Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berfungsi sosial setelah mendapatkan Pemenuhan kebutuhan dasar	Orang	707	906	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Pelayanan Pemenuhan Kebutuhan Dasar X 100%	128,15%
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) melalui Kelembagaan	Cakupan Peningkatan Kemampuan SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	Orang	1086	1086	Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Nilai evaluasi Post test Minimal 70 dalam Bimbingan Teknis Kesejahteraan Sosial	100%

Tabel 3.2 yang menampilkan mengenai capaian indikator kinerja utama Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut :

1. Capaian indikator 1 diperoleh melalui Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang meningkat Pendapatannya dalam Pemenuhan Kebutuhan dalam hal ini adalah pemberian Bantuan jaminan hidup bagi eks kusta sebanyak 400 orang dibagi Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan bantuan sebanyak 990 Orang sehingga capaian indikator kinerja utama 1 sebesar 80,8% dengan kategori tinggi.
2. Capaian indikator 2 diperoleh melalui Jumlah penerima manfaat di dalam panti, Pemulangan Orang Terlantar dan Bantuan bagi Eks Kusta yang ditargetkan sebanyak 707 orang dengan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berfungsi sosial setelah mendapatkan Pemenuhan kebutuhan dasar sebanyak 906 Orang Berdasarkan perbandingan tersebut maka capaian indikator kinerja utama 2 yaitu sebesar 128,15% dengan kategori sangat tinggi.
3. Capaian indikator 3 diperoleh melalui Jumlah SDM Kesos yang mendapatkan Nilai evaluasi Post Test Minimal 70 dalam bimbingan Teknis Kesejahteraan sosial sebanyak 1086 orang dibandingkan Jumlah SDM kesos yang ditargetkan mendapatkan

Peningkatan kemampuan dalam bimbingan Teknis Kesejahteraan Sosial sebanyak 1086 orang sehingga capaian indikator kinerja utama mencapai 100% dengan kategori sangat tinggi.

B. CAPAIAN KINERJA SASARAN

SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai mencapai Tujuan dan Sasaran sebagaimana tertuang dalam RPD 2024-2026 yaitu Mengoptimalkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (TUJUAN I) dengan Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah (SASARAN 1) serta Optimalnya Kualitas pelayanan publik (SASARAN 2). Untuk mengukur sasaran tersebut terdapat 5 (lima) indikator kinerja dengan analisis pencapaian kinerja sebagai berikut :

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Tabel 3.3
Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	100%	Nilai 90	Nilai 90	100%
2	Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah	100%	Nilai 97,20	Nilai 97.14	99.94%
3.	Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti	0%	100%	100%	100%
4.	Nilai sakis OPD	80.45	78	80.90	103.72%
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	Nilai 82	Nilai 79.6	97.07%

Realisasi 3 indikator kinerja pada sasaran 1 telah mencapai target dan 1 indikator kinerja belum mencapai target. Akan tetapi, capaian keempat indikator

kinerja yang terdapat pada sasaran 1 memiliki capaian kinerja dengan kriteria sangat tinggi.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja 2 (dua) Tahun Terakhir

No	Indikator	Capaian 2024	Capaian 2023
1.	Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	100%	100%
2.	Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah	99.94%	100%
3.	Nilai Sakip OPD	103.72%	92,47%
4.	Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti	100%	100%
5.	Indkes Kepuasan Masyarakat	97.07%	0

Tiga indikator menunjukkan kinerja yang konsisten (100%), yaitu Rata-rata Nilai SKP ASN, Persentase Temuan Materiil, dan Nilai SAKIP OPD dengan peningkatan signifikan pada SAKIP OPD, Penurunan kecil terjadi pada indikator Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah dan Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai hasil positif di tahun 2024 dengan 97,05%, tetapi data tahun 2023 tidak tersedia untuk perbandingan.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dan standar nasional

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja 2024, Jangka Menengah dan Nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi Target		
		Realisasi 2024	Target Jangka Menengah	Target Nasional
1	Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	Nilai 90	Nilai 100,42	100%
2	Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah	Nilai 97.14	Nilai 86,96	Nilai 71
3	Nilai Sakip OPD	80,90	68,52 (B)	BB
4	Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti	100%	79,32%	75%
5.	Indkes Kepuasan Masyarakat	Nilai 79.6	A (4,01-4,50)	3,75

1. Realisasi Kinerja 90 berada di bawah Target Jangka Menengah 100,42, tetapi masih memiliki peluang untuk meningkat, Target Nasional 100% mengindikasikan standar yang lebih tinggi, yang berarti bahwa untuk memenuhi target nasional, Perangkat Daerah perlu meningkatkan kinerja mereka lebih jauh dari nilai 90. Dengan nilai 90 sudah menunjukkan kinerja yang cukup baik, tetapi ada ruang yang signifikan untuk meningkatkan kualitas kinerja agar dapat mencapai target jangka menengah dan target nasional.
2. Realisasi Kinerja 2024 (97.14) jauh lebih tinggi dari Target Jangka Menengah 86.96 dan Target Nasional 71, menunjukkan bahwa kinerja Perangkat Daerah untuk tahun 2024 sangat baik, bahkan melebihi ekspektasi jangka menengah dan standar nasional. Nilai 97.14 menunjukkan bahwa Perangkat Daerah sudah berhasil melampaui target-target yang lebih rendah, memberikan indikasi bahwa program-program yang dijalankan sudah sangat efektif dan efisien.. Target Nasional 71 menjadi acuan bahwa pencapaian Perangkat

Daerah di 2024 sangat jauh melebihi standar nasional, menandakan kinerja yang patut diapresiasi.

3. Realisasi Kinerja 2024 (80.90) sudah jauh melampaui Target Jangka Menengah (68.52), menunjukkan bahwa OPD telah melaksanakan kinerja yang lebih baik dari yang direncanakan untuk periode jangka menengah tersebut. Nilai 80.90 juga sangat mendekati atau bahkan dapat memenuhi standar untuk mendapatkan predikat BB di tingkat nasional, yang berarti OPD sudah berada pada tingkat yang baik dalam hal akuntabilitas dan kinerja. Dengan nilai tersebut, OPD berada dalam posisi yang sangat positif, karena telah melebihi ekspektasi jangka menengah dan mendekati atau sudah memenuhi target nasional.
4. Realisasi Kinerja 2024 (100%) jauh melampaui Target Jangka Menengah (79.32%) dan Target Nasional (75%), menunjukkan bahwa pencapaian Perangkat Daerah pada tahun 2024 sangat baik. 100% mencerminkan bahwa semua temuan LHP telah ditindaklanjuti, yang berarti tidak ada temuan yang dibiarkan begitu saja. Ini menunjukkan tingkat akuntabilitas dan pengelolaan temuan yang sangat tinggi.
5. Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan memiliki skala 1-100 yang dalam hal ini pada tahun 2024 nilai IKM sebesar 79.6 yang menjelaskan bahwa Tingkat kepuasan sudah kategori sangat baik. Namun, nilai 79,6 mungkin belum sepenuhnya mencapai Predikat A (4.01-4.50) untuk target jangka menengah, yang berarti masih ada ruang untuk meningkatkan kualitas layanan guna mencapai standar tertinggi

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan utama terlihat pada capaian rata-rata nilai SKP ASN perangkat daerah yang mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa pegawai di lingkungan Dinas Sosial telah bekerja sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan. Hal ini didukung oleh sistem evaluasi yang efektif, disiplin ASN, serta adanya pembinaan kinerja yang berkelanjutan. Selain itu, persentase tindak lanjut temuan LHP mencapai 100%, menandakan adanya komitmen kuat dalam menindaklanjuti hasil

audit dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas tata kelola keuangan di lingkungan Dinas Sosial. Nilai SAKIP OPD yang mencapai 103,72% dari target juga menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kerja sudah semakin membaik, terutama dalam efektivitas program sosial yang menysasar PPKS.

Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target secara optimal. Nilai rata-rata capaian indikator kinerja program perangkat daerah mencapai 99,94%, yang menunjukkan bahwa masih ada kendala dalam pelaksanaan program. hambatan ini berkaitan dengan adanya refocusing anggaran yang menyebabkan tidak dapat berjalannya salah satu kegiatan. Selain itu, indeks kepuasan masyarakat hanya mencapai 97,07% dari target yang ditetapkan, yang berarti masih ada aspek layanan sosial yang perlu ditingkatkan.

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan ke depan, perlu dilakukan beberapa langkah strategis. Efisiensi dalam pelaksanaan program sosial harus ditingkatkan, baik dalam hal pencairan anggaran yang tepat waktu, penguatan koordinasi dengan mitra kerja, maupun optimalisasi sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan sosial. Selain itu, perbaikan dalam pelayanan sosial menjadi hal yang krusial guna meningkatkan kepuasan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan mempercepat proses distribusi bantuan, meningkatkan keterbukaan informasi program sosial, serta mengembangkan inovasi layanan berbasis teknologi agar lebih mudah diakses oleh masyarakat.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi Penggunaan Sumber daya yaitu Penyerapan Anggaran dan Tingkat Efisiensi Indikator Kinerja. Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2024 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar Rp 1.308.166.040,- dengan realisasi sebesar Rp 1.274.881.431,- atau 97,46%. Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100.14% berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 102,75%.

Tabel 3.6
Program Pendukung Sasaran 1

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG	TARGET	REALIASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	1.308.166.040	1.274.881.431

f. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.7
Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 1

SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN PENDUKUNG	TARGET	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN	ANALISIS	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%	100%	1.308.166.040	1.274.881.431	Sudah Sesuai dengan sasaran
		1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dok	6 Dok	363.890.840	330.057.151	
		a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok	4 Dok	345.154.840	316.612.151	
		b. Koordinasi dan Penyusunan	1 Dok	1 Dok	11.771.000	6.480.000	

		Dokumen RKA SKPD					
		c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	6.965.000	6.965.000	
		2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	330 Orang	330 Orang	120.358.200	119.658.000	
		a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	120.358.200	119.658.000	
		3) Administrasi Umum Perangkat Daerah	24 Laporan	24 Laporan	832.917.000	825.166.280	
		a. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	24 Laporan	832.917.000	825.166.280	

SASARAN STRATEGIS 2

Peningkatan Pelayanan dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Untuk mengukur sasaran ini terdapat 2 (dua) indikator kinerja dengan analisis pencapaian sebagai berikut:

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja pada sasaran Meningkatkan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Peningkatan Pendapatan dalam Pemenuhan Kebutuhan Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	51,47%	50%	40,40%	80.8%
2	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berfungsi sosial setelah mendapatkan Pemenuhan kebutuhan dasar	100%	707 Orang	906 Orang	128.14%

Capaian indikator kinerja 1 pada sasaran 2 Tahun 2024 sebesar 80.8% dengan kriteria tinggi. Realisasi indikator kinerja 1 diperoleh berdasarkan jumlah PPKS yang meningkat pendapatannya yaitu jaminan hidup bagi eks kusta sebanyak 400 orang yang dibantu oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan dalam bentuk Bantuan Sosial berupa uang dan barang. Adapun target tidak dapat tercapai dikarenakan pada tahun 2024 direncanakan pemberian bantuan sosial barang kepada fakir miskin sebanyak 590 orang tetapi tidak dapat terlaksana dikarenakan adanya refocusing anggaran.

Foto Verifikasi dan Validasi Data Eks Kusta



Foto Penyaluran Bantuan Sosial Uang kepada Eks Kusta



Capaian indikator kinerja 2 pada sasaran 2 tahun 2024 sebesar 128.14% dengan kriteria sangat tinggi. Realisasi indikator kinerja 2 diperoleh berdasarkan jumlah Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Tuna Susila yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti sebanyak 302 Orang serta Pemulangan Orang Terlantar sebanyak 199 Orang dan Bantuan Sosial Uang bagi eks kusta sebanyak 400 orang.

Foto Pelayanan Pemberian Pemenuhan Kebutuhan Dasar dalam Panti





Foto Pemulangan Orang Terlantar ke Daerah Asal



b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan tahun lalu untuk indikator kinerja pada sasaran 2, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Capaian Tahun 2024 dan 2023

No	Indikator	Capaian 2024	Capaian 2023
1.	Persentase Peningkatan Pendapatan dalam Pemenuhan Kebutuhan Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	80.8%	102,94%

2.	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berfungsi sosial setelah mendapatkan Pemenuhan kebutuhan dasar	128.14	100%
-----------	--	--------	------

1. Pada 2023, indikator ini tercapai dengan 102,94%, yang berarti pencapaian lebih dari target, sehingga program peningkatan pendapatan untuk PPKS lebih berhasil dari yang direncanakan. Pada 2024, capaian turun menjadi 80,8%, yang menunjukkan adanya penurunan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meskipun angka ini lebih rendah dibandingkan dengan target dan capaian tahun lalu tetapi pencapaian ini masih berada di angka yang Tinggi.
 2. Pada 2023, indikator ini tercapai dengan 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh PPKS yang menerima pemenuhan kebutuhan dasar dapat berfungsi sosial dengan baik. Pada 2024, pencapaian ini meningkat secara signifikan menjadi 128,14%, yang menunjukkan bahwa lebih banyak PPKS yang dapat berfungsi sosial dibandingkan dengan target yang ditetapkan.
- c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dan standar nasional.**

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Kinerja 2024, Jangka Menengah dan Nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi Target		
		Realisasi 2024	Target Jangka Menengah	Target Nasional
1	Persentase Peningkatan Pendapatan dalam Pemenuhan Kebutuhan Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	40.40%	50%	80%

2	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berfungsi sosial setelah mendapatkan Pemenuhan kebutuhan dasar	906 Orang	707 Orang	99,35%
----------	--	-----------	-----------	--------

Capaian Persentase Peningkatan Pendapatan dalam Pemenuhan Kebutuhan Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) saat ini cukup signifikan, namun masih perlu upaya peningkatan sekitar 9,6% untuk mencapai target jangka menengah dan hampir dua kali lipat untuk mencapai target nasional. Perlu strategi peningkatan kemandirian ekonomi bagi PPKS, seperti pelatihan keterampilan, akses permodalan, dan pendampingan usaha.

Realisasi Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berfungsi sosial setelah mendapatkan Pemenuhan kebutuhan dasar saat ini telah melebihi target jangka menengah, yang menunjukkan efektivitas program pemenuhan kebutuhan dasar. Untuk menjaga keberlanjutan, perlu ada monitoring jangka panjang serta program pendampingan lanjutan agar PPKS dapat terus berfungsi sosial secara optimal.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan

Tidak tercapainya target peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan capaian hanya 40,40% dari target 50% disebabkan oleh adanya refocusing anggaran dikarenakan efisiensi anggaran sehingga dikhawatirkan tidak dapat terbayarkan, yang mengakibatkan beberapa program pemberdayaan ekonomi tidak dapat terlaksana, khususnya bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Bantuan ini awalnya dirancang untuk memberikan modal usaha, alat produksi, serta pelatihan kepada PPKS guna meningkatkan kemandirian ekonomi mereka.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi Penggunaan Sumber daya yaitu Penyerapan Anggaran dan Tingkat Efisiensi Indikator Kinerja. Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2024 untuk

mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 3 Program sebesar Rp 3.077.058.147,- dengan realisasi sebesar Rp 2.927.416.675,- atau 95,13%. Dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 104.47% berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 91,05%.

Tabel 3.11
Program Pendukung Sasaran 2

SASARAN		PROGRAM PENDUKUNG	
2	Peningkatan Pelayanan dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
		2	Program Rehabilitasi Sosial
		3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

f. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran adalah Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Program Penanganan warga Nergara Korban Tindak Kekerasan dengan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.12
Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 2

SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN PENDUKUNG	TARGET	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN	ANALISIS
2	A. Program Rehabilitasi Sosial	100%	100%	1.860.710.947	1.782.245.340	
	1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	20 Orang	20 Orang	22.632.100	19.794.000	

(PPKS)	2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	215 Orang	215 Orang	1.037.157.387	984.670.300	Karena adanya refocusing anggaran, pemberian rehabilitasi social anak terlantar dilaksanakan hanya 1 angkatan
	3) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	60 Orang	60 Orang	572.776.260	556.912.740	Jumlah Lansia terlantar yang ada di dalam panti sebanyak 60 orang
	4) Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	50 Orang	0	0	0	Kegiatan ini tidak terlaksana dikarenakan adanya refocussing anggaran
	5) Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	50 Orang	50 Orang	228.145.200	220.868.300	Karena adanya refocusing anggaran, pemberian rehabilitasi social Tuna Sosial dilaksanakan hanya 1 angkatan
	B. Program dan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100%	100%	906.874.700	886.321.100	
	1) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	400 orang	400 Orang	906.874.700	886.321.100	
	C. Program Penanganan warga Negera Korban Tindak Kekerasan	100%	100%	309.472.500	258.850.235	

	1) Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	300 orang	199 Orang	309.472.500	258.850.235	Pelaksanaan kegiatan terealisasi 100% dikarenakan semua usulan orang terlantar sebanyak 199 orang dipulangkan semua ke daerah asal
--	---	-----------	-----------	-------------	-------------	--

SASARAN STRATEGIS 3

Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) melalui Kelembagaan

Untuk mengukur sasaran ini terdapat 1 (satu) indikator kinerja dengan analisis pencapaian sebagai berikut:

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja pada sasaran 3 yaitu “Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan Sosial (PSKS) melalui kelembagaan” diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.13
Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Cakupan Peningkatan Kemampuan SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	1077 Orang	1086 Orang	1086 orang	100%

Cakupan Peningkatan Kemampuan SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang mengikuti bimbingan teknis kesejahteraan social pada Tahun 2024 ditargetkan sebanyak 1086 Orang. Realisasi indikator ini pada tahun 2024 sebanyak 1086 Orang sehingga memiliki capaian kinerja sebesar 100%. SDM Penyelenggara yang mengikuti bimbingan teknis pada Tahun 2024 yaitu Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 1086 Orang. Kegiatan ini di buka oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan Prof. Zudan Arif Fakrulloh pada Hari Rabu 09 Oktober 2024 yang juga diikuti oleh seluruh Pendamping PKH kabupaten atau kota se-Sulsel secara serentak melalui Zoom Meeting bekerja sama denga Pemerintah Kota Makassar. Bimbingan Teknis kepada Pendamping PKH ini berkaitan dalam penanganan stunting bertujuan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mendampingi keluarga penerima manfaat (KPM) agar lebih optimal dalam aspek **gizi, kesehatan, dan pola asuh anak**



b. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan tahun lalu untuk Indikator kinerja pada sasaran 3, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14
Perbandingan Capaian Tahun 2024 dan 2023

No	Indikator	Capaian 2024	Capaian 2023
1.	Cakupan Peningkatan kemampuan SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	100%	419,06%

Pada 2023, capaian 419,06% menunjukkan pencapaian yang sangat melebihi target yang ditetapkan, artinya lebih banyak SDM yang terlibat dalam peningkatan kemampuan dibandingkan dengan yang direncanakan atau disarankan oleh perencanaan awal. Pada 2024, capaian ini sudah mencapai 100%, yang sesuai dengan target yang ditetapkan untuk tahun tersebut.

- c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dan standar nasional

Tabel 3.15
Perbandingan Realisasi Kinerja 2024, Jangka Menengah dan Nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi Target		
		Realisasi 2024	Target Jangka Menengah	Target Nasional
1	Cakupan Peningkatan kemampuan SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	100%	100%	84,25%

Realisasi cakupan peningkatan kemampuan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial pada tahun 2024 telah mencapai 100%, sesuai dengan target jangka menengah dan melampaui target nasional sebesar 84,25%. Capaian ini menunjukkan bahwa program pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM telah berjalan secara optimal.

- d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan

Sesuai dengan program prioritas Pj. Gubernur Sulawesi Selatan yaitu menyukseskan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 berlangsung secara luber, jurdil, lancar, aman dan damai; Pengendalian Inflasi; Penanganan Stunting dan Gizi Buruk; Pengentasan Kemiskinan Ekstrem; Ketahanan dan Kedaulatan Pangan; Kemudahan Pelayanan Publik dan Investasi; Sinergi Program Prioritas Nasional dan Daerah; dan Stabilitas Sosial, Politik, Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum. Dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan diberikan tugas dalam pengentasan Kemiskinan dan Penanganan Stunting Peningkatan kemampuan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis menjadi kegiatan yang mendukung program proritas Gubernur Sulawesi Selatan pada tahun 2024, maka kegiatan bimbingan teknis bagi Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dilaksanakan dan didukung dari beberapa stakeholder. Hal ini menjadi pendorong bertambahnya jumlah SDM

penyelenggara kesejahteraan social yang mendapatkan bimbingan teknis dan mendapatkan nilai minimal 70 pada post test setelah mengikuti bimbingan teknis.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi Penggunaan Sumber daya yaitu Penyerapan Anggaran dan Tingkat Efisiensi Indikator Kinerja. Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2024 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 1 Program sebesar Rp26.755.100,- dengan realisasi sebesar Rp 10.186.000,- atau 38.07%. Dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100% berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 38,07%.

Tabel 3.16
Program Pendukung Sasaran 3

SASARAN		PROGRAM PENDUKUNG	
3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Melalui Kelembagaan	1	Program Pemberdayaan Sosial

f. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran adalah Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Program Penanganan Bencana dengan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.17
Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 3

SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN PENDUKUNG	TARGET	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN	ANALISIS
3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Melalui Kelembagaan	100%	100%	26.755.100	10.186.000	Realisasi Anggaran tidak 100%, tetapi realisasi fisik 100%
	A. Program Pemberdayaan Sosial 1) Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	1086 orang	1086 Orang	26.755.100	10.186.000	

C. Realisasi Anggaran

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dan menurunkan jumlah PPKS, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 mengalokasikan anggaran sebesar Rp.50.491.262.111,- dapat direalisasikan sebesar Rp.50.025.746.700,- atau 99.08%. Secara rinci anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.19
Anggaran Dinas Sosial Prov. Sulsel Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Langsung	50.491.262.111	50.025.746.700	99.08
	Jumlah	50.491.262.111	50.025.746.700	

Adapun rincian realisasi anggaran APBD Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.20
Rincian Anggaran Program dan Kegiatan
Dinas Sosial Prov. Sulsel Tahun 2024

No	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	363.890.840	330.057.151
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	40.808.827.333	40.711.655.537
		Administrasi umum perangkat daerah	1.037.351.700	1.005.884.880
		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	4.473.502.590	4.426.975.358

		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	156.845.000	81.573.226
2	Program Pemberdayaan Sosial	Penerbitan Izin pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	7.643.600	7.510.000
		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	428.527.100	406.586.773
2.	Program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah Kab/ Kota	309.472.500	258.850.235
3.	Program rehabilitasi sosial	Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti	22.632.100	19.794.000
		Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	1.037.157.387	984.670.300
		Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	572.776.260	556.912.740

		Rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam panti	228.145.200	220.868.300
4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengangkatan Anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orangtua tunggal	37.368.200	31.252.600
		Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi	906.874.700	886.321.100
5.	Program penanganan bencana	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial provinsi	65,744.600	62.534.500
6.	Program pengelolaan taman makam pahlawan	Pengelolaan taman makam pahlawan	34.503.000	34.300.000
			50.491.262.111	50.025.746.700

D. Kendala dan Saran Perbaikan

Beberapa permasalahan dan kendala serta solusi perbaikan yang dihadapi pada setiap Indikator Kinerja Utama dalam upaya pencapaian target kinerja pelaksanaan Kinerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.21
Analisis Masalah dan Solusi Perbaikan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tercapai / Tidak Tercapai	Kendala	Solusi Perbaikan
1	Meningkatnya Pelayanan serta Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Peningkatan Pendapatan dalam Pemenuhan Kebutuhan Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Tidak Tercapai	1. Adanya Refocussing anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan Sosial Barang tidak dapat terlaksana 2. Tidak adanya akses data by name by address kemiskinan dari Kementerian.	1. Membuat surat permintaan data yang ditujukan ke Kementerian Sosial yang di tanda tangani Kepala Daerah
		Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berfungsi sosial setelah mendapatkan Pemenuhan kebutuhan dasar	Tercapai	1. Masih rendahnya Dukungan Sarana dan Prasarana untuk peningkatan pelayanan 2. Adanya Refocussing Anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan belum berjalan secara maksimal	1. Menyesuaikan Target dengan perubahan anggaran

BAB IV PENUTUP

LKIP bagi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2024, namun juga melihat pencapaian dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA dan target jangka menengah. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2024, terdapat 8 indikator yang memenuhi kriteria sangat tinggi. Secara umum simpulan pencapaian target kinerja Sasaran Strategis Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 adalah **Sangat tinggi**, sebagaimana tabel berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	CAPAIAN	KRITERIA
1	Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	100%	Sangat Tinggi
2	Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah	99.94%	Sangat Tinggi
3	Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti	100%	Sangat Tinggi
4	Nilai sakis OPD	103.72%	Sangat Tinggi
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	97.07%	Sangat Tinggi
6	Persentase Peningkatan Pendapatan dalam Pemenuhan Kebutuhan Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	80,8%	Tinggi
7	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berfungsi sosial setelah mendapatkan Pemenuhan kebutuhan dasar	128,15%	Sangat Tinggi
8	Cakupan Peningkatan Kemampuan SDM Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	100%	Sangat Tinggi
Rata-Rata Capaian		101,21%	Sangat Tinggi

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2024, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan

program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Faktor pendorong dalam capaian keberhasilan kinerja melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dan Tugas pembantuan bidang Sosial tahun 2024 adalah antara lain adalah ditetapkannya regulasi-regulasi pusat tentang tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga mendorong tumbuhnya komitmen untuk membangun dan melaksanakan AKIP tatanan SAKIP secara lebih komprehensif di seluruh sisi bidang penyelenggaraan pemerintahan. Semakin selarasnya berbagai kebijakan pusat dan lintas sektoral menumbuhkan pemahaman dan kesadaran tentang perubahan dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai suatu kebutuhan bukan sekadar kewajiban. Hal tersebut telah mendorong tingkat koordinasi yang semakin tinggi dalam upaya terus meningkatkan pelaksanaan birokrasi penyelenggaraan pemerintahan.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang.

Beberapa permasalahan yang dihadapi serta solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.

Makassar, Maret 2025
Kepala Dinas Sosial
Provinsi Sulawesi Selatan



Dr. ABD. MALIK FAISAL, S.H.,M.Adm.Pemb
Pembina Utama Madya / IVd
NIP. 19670403 199703 1 007

